



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISWANTI
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 401178

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.325.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.644.000.000

1. MOBIL, WRANGLER RUBICON JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000
3. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER PRADO JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. MOBIL, HAMMER (SECOND) MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. MOBIL, HONDA HRV (SECOND) SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.992.000.000



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.992.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.